

## Press Brief Diskusi Publik INDEF

### “Ekonomi Lebaran, Saat Cekak Anggaran”

**Jakarta, 19 Maret 2025** – Lebaran selalu menjadi momen spesial bagi masyarakat Indonesia. Namun, kondisi makroekonomi saat ini seperti fluktuasi harga kebutuhan pokok dan tekanan fiskal membuat pemerintah harus lebih cermat dalam mengelola anggaran. Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai stimulus ekonomi untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi selama Ramadan dan Lebaran 2025.

Namun, seberapa efektif kebijakan ini dalam membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi saat Lebaran?

**Eko Listiyanto - Direktur Pengembangan Big Data INDEF**, menyoroti isu ekonomi Lebaran di tengah efisiensi anggaran menggunakan analisis big data dari media sosial, khususnya Twitter (X) [284.970 perbincangan] dan lokapasar/e-commerce Tokopedia [2.283 produk unik terjual]. Eko mengidentifikasi tiga isu utama: efisiensi anggaran; perubahan harga bahan pokok; dan penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah mendapat penolakan mayoritas publik, dengan 67,4% responden memberikan respons negatif. Meskipun dianggap penting untuk mendukung program prioritas, banyak yang khawatir dampak efisiensi terhadap sektor penting seperti pendidikan dan pelayanan publik. Selain itu, masyarakat lebih mendukung efisiensi anggaran untuk membayar utang ketimbang untuk pembiayaan MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Danantara. Bahkan 98,2% responden memberikan sentimen negatif terhadap alokasi efisiensi untuk dialihkan ke Danantara.

Harga bahan pokok di e-commerce tercatat mengalami kenaikan signifikan, terutama pada barang-barang seperti bawang merah, telur, daging ayam, dan minyak goreng, yang fluktuasinya semakin meningkat menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran. Hal ini memberikan beban tambahan bagi konsumen, terutama karena daya beli yang tertekan. Kenaikan harga ini, jika terus berlanjut, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga.

Terkait anjloknya IHSG, 71,7% responden memberikan sentimen negatif, mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Meskipun sebagian berpendapat bahwa penurunan IHSG tidak langsung berdampak pada rakyat kecil, banyak yang menilai hal ini sebagai indikasi ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas dan semakin menegaskan bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Kebijakan efisiensi anggaran dan pergerakan harga bahan pokok serta penurunan IHSG mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang menjadi perhatian utama publik. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan stabilisasi harga bahan pokok menjadi kunci untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama menjelang Lebaran. Serta hasil efisiensi anggaran perlu diarahkan pada belanja produktif yang memberikan dampak cepat bagi perekonomian, terutama di sektor pangan dan perbaikan daya beli masyarakat.

Untuk mencapai hal di atas, pemerintah harus memastikan ketersediaan stok bahan pokok yang cukup dan menjaga distribusi yang lancar agar harga tetap stabil dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, penting untuk membangun optimisme perekonomian dengan menetapkan target-target yang realistis dan fokus pada perbaikan defisit fiskal, agar anggaran tidak semakin melebar dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan kestabilan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mendukung pemulihan perekonomian secara lebih efektif.

**M. Rizal Taufikurahman - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF**, menyoroti kondisi ekonomi makro saat ini menunjukkan stagnansi pertumbuhan, di mana pertumbuhan ekonomi dari kuartal ke kuartal mengalami penurunan, sementara secara tahunan tetap stabil namun semakin berat untuk mencapai target 5,2%. Deflasi menjadi indikator utama yang mencerminkan kondisi konsumsi masyarakat, di mana pada bulan Januari hingga Februari terjadi deflasi sebesar -0,48%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti diskon listrik 50%, serta kemungkinan melemahnya kinerja ekonomi secara umum. Selain itu, jumlah uang beredar juga mengalami penurunan hingga 8,04%, yang menandakan berkurangnya likuiditas dalam perekonomian.

Fenomena mudik Lebaran turut memberikan dampak terhadap ekonomi nasional. Jumlah pemudik pada 2025 diperkirakan mengalami penurunan, yang berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor konsumsi. Mudik Lebaran saat ini dapat mencerminkan tekanan dalam pertumbuhan konsumsi, sehingga nilai tambah ekonomi regional juga mengalami penurunan. Aktivitas industri di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa, turut terdampak akibat penurunan produktivitas selama periode mudik. Sementara itu, daya beli masyarakat juga melemah akibat tren harga yang cenderung meningkat. Harapannya, inflasi dapat tetap terjaga, namun di sisi lain, pemerintah perlu mencari cara agar konsumsi tetap meningkat guna menjaga pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah perlu fokus pada beberapa intervensi strategis untuk mendukung ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi tantangan melemahnya daya beli masyarakat. *Pertama*, intervensi langsung terhadap kelompok rentan, seperti memberikan subsidi atau bantuan sosial secara *targeted* kepada kelompok miskin dan pekerja informal untuk menjaga stabilitas konsumsi lokal. *Kedua*, mengamankan pasokan bahan pokok dengan berkoordinasi dengan Bulog dan distributor lokal untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi daya beli masyarakat. *Ketiga*, stimulus fiskal untuk UMKM sangat diperlukan, dengan memberikan subsidi bunga, insentif pajak, atau bantuan modal kerja agar UMKM tetap bertahan di tengah penurunan daya beli. *Terakhir*, efektivitas belanja publik perlu ditingkatkan dengan fokus pada belanja padat karya di tingkat daerah, yang dapat menciptakan lapangan kerja alternatif sementara bagi masyarakat yang terdampak.

Menurut **Riza Annisa Pujarama – Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF**, Stimulus ekonomi yang terus-menerus sejak Januari hingga Maret 2025 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dan sektor usaha masih belum membaik. Meski pemerintah telah berupaya dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan memberikan insentif pajak, kinerja sektor konsumsi sepertinya masih belum banyak mengalami perubahan.

Menyoroti data realisasi APBN, Riza menyebutkan bahwa realisasi pendapatan dan realisasi belanja negara sama-sama mengalami penurunan, namun demikian penurunan belanja negara belum bisa membantu defisit anggaran sebesar 31,2 triliun rupiah. Pendapatan negara, terutama dari pajak, mengalami penurunan signifikan. Upaya peningkatan penerimaan pajak belum berhasil dilakukan baik itu melalui UU Harmonisasi Perpajakan maupun *Coretax*. Peningkatan penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir, terutama bersumber dari *windfall* (peningkatan harga energi) bukan dari reformasi pajak yang dilakukan. Lebih detail, Riza menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak per Januari 2025 menunjukkan penurunan penerimaan PPN DN yang mengindikasikan pelemahan daya beli di masyarakat karena penerimaan pajak dari konsumsi barang dan jasa masyarakat turun. Indikasi pelemahan daya beli masyarakat ditunjukkan juga dari penurunan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan dari penurunan PPh Orang Pribadi. Perlambatan penerimaan PPh Badan terus berlanjut sejak 2024. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa badan usaha sedang tertekan, disamping ada kendala pada pelaporan pajak karena *Coretax*.

Riza juga menyoroti perkembangan rasio pajak dan rasio utang yang belum menunjukkan tren yang membaik. Defisit di awal tahun dapat menjadi sinyal negatif terhadap perkembangan utang di tahun 2025. Realisasi utang Pemerintah Pusat per Februari menembus 9.000 triliun rupiah. Menurutnya terdapat potensi penarikan utang lebih besar yang dapat melebarkan defisit anggaran jika penerimaan perpajakan tidak membaik.

Riza menutup paparannya dengan memberikan kesimpulan dan rekomendasinya, yaitu: **(1)** Stimulus ekonomi yang tak henti sejak awal Januari menunjukkan bahwa daya beli masyarakat belum membaik, demikian pula dengan sektor dunia usaha; **(2)** Pemerintah perlu segera memperbaiki sistem administrasi pajak agar penerimaan pajak dapat segera dihimpun; **(3)** Pertumbuhan ekonomi berpotensi meningkat dengan guyuran stimulus tersebut, tapi bersifat semu dan tidak sustain. Cara-cara instan (dengan memberi stimulus fiskal) untuk mendorong konsumsi dan daya beli perlu dikurangi karena tidak sustain di jangka menengah-panjang. Jika hal ini terus berlanjut maka akan menambah beban APBN ke depannya; dan **(4)** Pemerintah perlu segera melakukan percepatan dalam melakukan transformasi ekonomi agar segera bisa mendorong produktivitas dan menciptakan lapangan pekerjaan.

**Fadhila Maulida – Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM INDEF**, menyoroti mudik Lebaran memberikan dampak ekonomi, terutama pada sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi daerah. Kegiatan mudik meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) melalui retribusi daerah di wilayah tujuan, namun dampaknya tidak merata. Wilayah yang tidak terdampak mudik tidak merasakan pertumbuhan ekonomi yang sama dengan daerah yang menjadi destinasi mudik. Pasca-pandemi, tren pariwisata di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, dan DKI Jakarta menunjukkan hasil yang positif, begitu juga dengan destinasi wisata di Bali, NTB, dan NTT. Bali tetap menjadi destinasi utama, dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang tertinggi, diikuti oleh Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, yang menunjukkan potensi pertumbuhan sektor wisata bisnis dan alam.

Tren perjalanan darat juga semakin meningkat, membuka peluang bagi destinasi wisata yang lebih mudah dijangkau, serta sektor perhotelan dan kuliner. Namun, destinasi yang tidak dilalui jalur mudik perlu promosi lebih intensif agar kunjungan dapat meningkat. Meskipun ada dukungan pemerintah berupa diskon tarif tol, tiket pesawat, dan kereta api sentimen publik terhadap liburan di musim Lebaran 2025 cenderung negatif. Perbincangan banyak berfokus pada destinasi populer seperti Bali, Mandalika, dan Kepulauan Seribu. Penurunan kunjungan ke destinasi wisata domestik berdampak pada sektor ekonomi kreatif, perhotelan, restoran, transportasi pariwisata, dan UMKM yang bergantung pada wisatawan.

Untuk mengurangi dampak negatif ini, pemerintah perlu memperkuat promosi wisata pasca-Lebaran, mendiversifikasi produk wisata, serta meningkatkan pemasaran digital dan aksesibilitas infrastruktur destinasi wisata. Meskipun sektor pariwisata domestik menghadapi tantangan, potensi pertumbuhan tetap ada jika strategi yang tepat diterapkan, termasuk untuk pemerataan kunjungan dan manfaat ekonomi yang lebih luas. Diversifikasi destinasi wisata dan penyebaran wisatawan ke lokasi alternatif akan membantu mengurangi ketimpangan dan memastikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Narahubung: Sarwo Edi (+62 813-8047-7878)

[www.indef.or.id](http://www.indef.or.id)